BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah Awal Pembentukan Direktorat Vulkanologi

Dalam periode tahun 1920-1960 setelah letusan Gunung Kelut yang menimbulkan bencana besar di sekitarnya, terutama daerah Blitar, menewaskan lebih dari 5.000 jiwa penduduk. Setahun sebelum ada Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat, pada waktu itu sebuah seksi untuk penyelidikan gunungapi dibentuk dibawah biro pertambangan. Tugas utamanya menyelidiki, memberikan saran dalam menanggulangi malapetaka akibat letusan gunungapi secara maksimal. Pos pengamatan gunungapi permanen dibangun didekat gunungapi yang berbahayadan petunjuk-petunjuk diberikan kepada pemerintah setempat, penduduk, administratur perkebunan dan lain-lain, dalam mengamati gunungapi didekatnya dalam rangka kesiagaan menghadapi bencana letusan. Sampai periode antara 1985-1994 akhir PELITA V atau Pembangunan Jangka Panjang Tahap I Direktorat Vulkanologi telah memiliki 65 buah Pos Pengamatan Gunungapi untuk mengamati 60 buah gunungapi yang tersebar diseluruh negeri.

Pada tingkat nasional sebuah badan koordinasi yang berhubungan dengan bencana alam telah didirikan oleh Pemerintah dalam 1979, yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA). Tujuan badan tersebut adalah mengkoordinasikan usaha dan tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi swasta atau non-pemerintah lainnya dalam menanggulangi bencana alam. Badan ini beranggotakan beberapa

menteri dan dipimpin oleh Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (MENKO KESRA). Menteri Pertambangan dan Energi yang membawahi Direktorat Vulkanologi merupakan salah satu anggota dari tim tersebut.

Direktorat Vulkanologi merupakan instansi atau lembaga yang hanya bertanggung jawab pada pemantauan gunung api, gempa bumi dan evaluasi kegiatannya serta bencana yang mungkin diakibatkannya.

2. 2. Tempat dan Kedudukan Direktorat Vulkanologi

Kedudukan Direktorat Vulkanologi adalah sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah pengawasan Menteri Pertambangan dan Energi atau lembaga yang hanya bertanggung jawab pada pemantauan gunung api dan evaluasi kegiatannya serta bencana yang mungkin ditimbulkannya. Dalam pertanggung jawabannya Direktorat Vulkanologi langsung memberikan laporan tentang perkembangan gunung api pada Menteri Pertambangan dan Energi.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Direktorat Vulkanologi

Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung dibentuk secara resmi dengan Keputusan Presiden No. 43, tanggal 19 September 1990 dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 02/KEP/MENKO/KESRA/I/1992. namanya menjadi Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dibawah pengawasan Menteri Pertambangan dan Energi, tugasnya bertanggung jawab terhadap pemantauan gunungapi diseluruh indonesia. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam

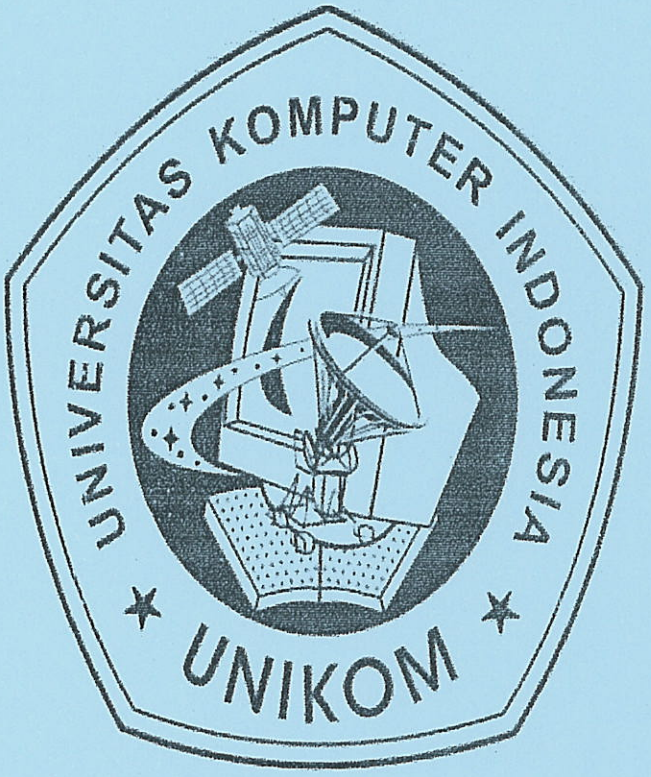
pertangung jawabannya tidak melalui instansi atau aparatur pemerintah lainnya seperti Gubernur tetapi langsung kepada Menteri Pertambangan dan Energi yang membawahinya dan selanjutnya Menteri Pertambangan dan Energi akan langsung bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Presiden.

2.4. Bidang Pekerjaan Direktorat Vulkanologi

Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merupakan instansi pemerintah dibawah pengawasan Menteri Pertambangan dan Energi, secara umum bertugas dan bertanggungjawab atas penangulangan bencana-bencana alam yang terjadi diseluruh indonesia.

2.5. Bidang Pekerjaan Direktorat Vulkanologi Tempat Kerja Praktek

Secara keseluruhan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi adalah bergerak dibidang penanggulangan bencana gempa, baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Namun pada dasarnya tempat dimana berlangsungnya kegiatan kerja praktek adalah dibagian Sub Dit pemantauan bencana gempa bumi hanya khusus menanggulangi masalah-masalah gempa bumi dan mencatat kapan terjadinya gempa tersebut dan kerugian-kerugian apa yang diderita oleh masyarakat yang terkena bencana gempa tersebut serta usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Sub Dit tersebut untuk mencegah banyaknya korban.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM